

**STRATEGI REKRUTMEN ANGGOTA PARTAI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI P) DI
KABUPATEN BATU BARA**

Diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan melengkapi persyaratan

Guna memperoleh gelar Sarjana (S-1)

Oleh :

HARDIYANTI

NIM: 44131008

JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM



Fakultas Ushuluddin & Studi Islam

Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara

Medan

2018



Nama : Hardiyanti
Nim : 44131008
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Studi Islam/Pemikiran Politik Islam
Pembimbing I : Prof. Amroeni Drajat, M.Ag
Pembimbing II : Junaidi, M.Si
Judul : **Strategi Rekrutmen Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Di Kabupaten Batu Bara**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Rekrutmen Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Di Kabupaten Batu Bara. Secara umum permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana *Strategi Rekrutmen Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) di Kabupaten Batu Bara*, namun ada beberapa hal yang diajukan sebagai sub permasalahan dalam penelitian ini yakni, Bagaimana strategi rekrutmen anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) di Kabupaten Batu Bara?, Bagaimana mekanisme atau proses rekrutmen anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) di Kabupaten Batu Bara?, Apa yang menjadi hambatan dan peluang dalam proses rekrutmen anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) di Kabupaten Batu Bara?

Sistim rekrutmen anggota PDI perjuangan dilakukan secara terbuka, dengan para kader mendatangi masyarakat yang ingin mendaftar menjadi anggota PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan juga membentuk struktural partai dari mulai PAC, Ranting dan Anak Ranting. Diluar struktural PDI Perjuangan juga membentuk sayap maksudnya membuat departemen-departemen seperti Bamusi, BEPEK, dan departemen olahraga. Dan rekrutmen perluasannya PDI Perjuangan juga melingkup tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Batu Bara. PDI Perjuangan memiliki hambatan di dalam merekrut anggota partai yaitu dengan dilakukannya sistem terbuka di dalam Pemilu maka perolehan kursi menjadi sulit bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk duduk di kursi DPR. Sulit bagi PDI Perjuangan untuk memperoleh suara terbanyak kalau dilakukannya sistem terbuka dalam pemilihan.

Berdasarkan proses penelitian pada strategi rekrutmen anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) di Kabupaten Batu Bara, penulis menyimpulkan bahwa PDI Perjuangan dalam merekrut anggota partai menolak adanya Pemilu yang sistemnya dilakukan secara terbuka.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah swt atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Rekrutmen Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) di Kabupaten Batu Bara”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial bagi jenjang mahasiswa S1 pada Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak mengalami hambatan dan kesulitan, namun dengan adanya motivasi, bimbingan, kritik dan saran dan kerja sama dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayah dan Ibu (bapak Edi Suharto dan ibu Hastuti) yang tercinta yang telah menyayangiku, memberiku semangat serta yang selalu mendoakan ku disetiap perjalanan hidup ku.
2. Adik-adikku tercinta yang selalu ada di sampingku dalam penyelesaian skripsi dan selalu membantuku dalam sulit maupun senang (Ica Sasmita dan Rivan Syandi).
3. Bapak Prof. Dr. Saidurahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi di UIN SU.
4. Dosen pembimbing skripsi I Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag dan dosen pembimbing skripsi II Bapak Junaidi, M.Si yang telah membimbing dalam pembuatan skripsi.
5. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag.

6. Bapak Kajor Pemikiran Politik Islam Drs. Muhammad Aswin M.AP seujur Pemikiran Politik Islam Bapak Hidayat dan Kalab PPI Ibu Elly Warnisyah M.Ag.
7. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU.
8. Buat temen-temenku seperjuangan Inun Nur Harefa dan Siti Ardianti Rukmana Rambe yang telah sama-sama berjuang ya walaupun kadang marah-marahan tapi mereka berdua baik hati dan penolong.
9. Trimakasih buat kawan-kawan sejurusan Pemikiran Politik Islam dan kawan-kawan se Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.
10. Buat seseorang yang *special* dan tersayang Abangda Mulyadi yang sudah membatu dalam penyusunan skripsi, selalu memberi dukungan, penyemangat, dan motivasi untuk terus maju sampai ketahap ini dan semoga kita sukses bersama-sama.
11. Teman-teman KKN yang sangat ku sayangi (Yusnaini, Ghafar, Reza, Kamil, Susi, Wita, Ayu, Nisa dan Nova).
12. Semua teman-teman yang sangat ku sayangi yang telah banyak memberi semangat (Nana, Kiki, Aisyah, Lina, Mawad, Hotma, Sardani, Azwan, Fauzar, dan Vika).

Akhirnya penulis dengan penuh harapan agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca umumnya penulis ucapkan terimakasih.

Penulis

Hardiyanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Definisi Partai Politik.....	13
B. Jenis-Jenis Partai.....	15
C. Ideologi Partai Politik	18
D. Tujuan Partai Politik	21
E. Kaderisasi Politik atau Rekrutmen Politik.....	22
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
A. Profil Batu Bara	28
B. Demografi dan Geografi Batu Bara	29
1. Iklim.....	30
2. Pemerintahan.....	30
3. Penduduk dan Ketenagakerjaan.....	31

4. Sosial.....	34
5. Pertanian	36
6. Perindustrian, Pertambangan dan Energi	39
7. Perdagangan	40
8. Pariwisata.....	41
BAB IV SEJARAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	44
A. Visi dan Misi PDI Perjuangan	48
B. Makna Lambang PDI Perjuangan.....	52
C. Tujuan Partai PDI Perjuangan.....	53
D. Platform Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	53
E. Hasil Penelitian Strategi Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Di Kabupaten Batu Bara.....	54
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan munculnya partai politik paska reformasi berbagai metode dan proses rekrutmen keanggotaan partai. Sebut saja, partai yang berasaskan agama biasanya metode rekrutmen dilakukan melalui sistem kaderisasi lembaga. Berbeda dengan partai-partai yang berhaluan nasionalis, mereka lebih banyak melakukan proses rekrutmen melalui orang-perorang.

Partai politik sebagai organisasi massa tentunya tidak lepas dari hakikatnya untuk merebut, mempertahankan dan menggunakan kekuasaan. Untuk mendapatkan itu semua partai politik harus dapat mempunyai dukungan massa yang banyak dan harus terus meningkat, selain itu untuk meneruskan dan menjalankan roda politik partai, massa sangat dibutuhkan keberadaannya.

Partai politik itu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Swt berfirman dalam Q.S Ash Shaff 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.¹

¹ Q.S. Ash Shaff Ayat 4.

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi atau pengangkatan seseorang atau sekelompok aktor politik untuk menduduki dan menjalankan peranan politik tertentu baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, seperti untuk menjadi anggota DPRD/DPR, menteri, direktur jenderal, gubernur, rektor, dekan, bupati, kepala desa, pimpinan partai, dan pimpinan kelompok-kelompok kepentingan. Partai politik mempunyai salah satu fungsi untuk menyeleksi dan memilih atau mengangkat seseorang atau beberapa orang anggotanya atau anggota masyarakat lainnya untuk menduduki dan melaksanakan peranan politik tertentu dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.²

Partai politik juga memiliki beberapa fungsi yaitu partai sebagai sarana komunikasi politik, partai sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Dari keempat fungsi partai politik tersebut yang paling signifikan terhadap keberlangsungan sebuah partai politik adalah rekrutmen politik karena pada fungsi ini partai politik mulai mencari anggota baru untuk menyediakan calon-calon pemimpin baik dalam lingkup lokal maupun nasional.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi modern saat ini, partai politik sangat dimanjakan dengan adanya kebebasan untuk aktif dan turut serta dalam proses pemerintahan. Salah satu bentuk partisipasi dari partai politik adalah mencetak calon pemimpin tersebut melalui fungsi rekrutmen politik. Proses rekrutmen dapat dilakukan secara terbuka, semi tertutup dan bahkan tertutup. Derajat keterbukaan rekrutmen akan dipengaruhi oleh derajat pelaksanaan sistem demokrasi suatu negara. Dengan sistem rekrutmen yang terbuka maka masyarakat akan dapat memilih pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik serta berakhlak mulia dan memiliki tujuan yang baik.

Oleh karena itu, sistem kaderisasi dalam partai politik mesti diefektifkan dalam membentuk kader yang berintegritas, profesional, kredibel untuk menawarkan

² Elly M. Setiadi, Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana, 2013). Hal. 283

(*suplay*) produk politik yang berkualitas kepada pasar pemilih. Sistem kaderisasi jika dibuka tujuan dan substansi utamanya adalah untuk membentuk kader yang memiliki jiwa kepemimpinan. Sehingga caleg tersebut dapat berperan baik di parlemen. Jika kader berkualitas, sejatinya pejabat publik terpilih, yang telah lolos proses perekrutan akan baik pula. Kalau sudah demikian bukan hal mustahil peran partai politik mewujudkan Negara yang mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi rakyat akan nampak pula. Itulah tujuan ideal yang harus dilakukan partai politik sehingga penting untuk dilakukan perekrutan sumber daya manusia agar memiliki jiwa kepemimpinan nantinya.³

Dalam mendapatkan pemimpin di dalam partai politik haruslah dilakukan suatu proses rekrutmen. Rekrutmen merupakan sarana dari partai politik untuk mendapatkan kader yang berpotensi untuk ditempatkan dalam jabatan publik. Fungsi rekrutmen menjadi sangat penting didalam partai politik. Sebagaimana dijelaskan Pamungkas, rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai di ruang publik. Siapa mereka, darimana asalnya, apa idiologinya, bagaimana pengalamannya akan menjadi petunjuk awal wajah politik partai di ruang publik. Wajah partai di ruang publik sangat tergantung pada bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik.⁴

Pada masa orde baru banyak partai-partai politik yang muncul yaitu PKRI, PSII, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, Golongan Karya. Sedangkan pada tahun 1973 partai-partai mengadakan fusi. Partai-partai yang berideologi Islam (NU, Parmusi, PSII, Perti) bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Dan partai-partai yang non Islam (PNI, partai Katolik, Parkindo, IPKI, Murba) berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia.⁵

³ Muhammad Agam Ashari, *Analisis Rekrutmen Politik: Studi Pada Rekrutmen Anggota Baru DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Tahun 2012-2013*.

⁴ Doni septian, *Rekrutmen Politik Dalam Penetapan Calon Legislatif 2014-2019* (Tanjungpinang: 2014). Hal. 6

⁵ P.K. Poerwantana, *Partai Politik Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). Hal. 79

Upaya penggabungan partai sebenarnya sudah mulai dipikirkan pemerintah Orba semenjak tahun 1966. Ketika itu ada kesadaran di kalangan pemerintah dan masyarakat umum bahwa pembaharuan struktur politik harus dilakukan dengan cara menyederhanakan sistem kepartaian. Tuntutan terhadap pembaharuan sistem politik meningkat seiring dengan kritik yang keras terhadap peran partai-partai politik yang dianggap telah memperlihatkan perangai buruk dalam sistem politik yang berlaku sebelumnya.⁶

Selama pemilu Orde Baru, PDI sulit bersaing dengan Golkar yang didukung oleh pemerintah. Dan perolehan suara PDI di pemilu dari masa ke masa, pada pemilu 1977 PDI hanya berhasil meraih 10,08 persen suara atau hanya 29 kursi di parlemen. Hal yang sama juga terjadi pada pemilu 1982-1992, di mana suara PDI tidak pernah lebih dari 15 persen. Bahkan saat konflik PDI meruncing dan Megawati memilih untuk golput pada pemilu 1997, suara PDI anjlok hingga hanya meraih 11 kursi di parlemen.⁷

Dalam perkembangan serta didorong oleh tuntutan situasi dan kondisi politik nasional, maka pada tanggal 1 Februari 1999, PDI pro Mega akhirnya membentuk partai baru yang merupakan kelanjutan tak terpisahkan dari PDI yang didirikan pada tanggal 10 Januari 1973. Nama partai diubah menjadi PDI Perjuangan, dengan azas Pancasila dan bercirikan kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. PDI Perjuangan juga mengubah logo kepala banteng dalam segilima menjadi banteng gemuk dalam lingkaran. Dan tidak terjadi perubahan platform kecuali lebih konsisten pada nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kerakyatan.

Pondasi politik partai diperkokoh dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga baru yang menekankan jati diri partai secara lebih terbuka. Tujuan umum partai adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendorong perdamaian dunia, sama dengan pembukaan UUD 1945. Sementara

⁶ Arif Zulkifli, *PDI Di Mata Golongan Menengah Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1996). Hal.56

⁷ Tim Divargo. Yugha E, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu* (Jakarta: Erlangga, 2014). Hal. 103

tujuan khususnya adalah memenangkan pemilu agar PDI Perjuangan memiliki sasaran untuk mencapai tujuan umumnya.⁸

Basis konstituen PDI Perjuangan pada dasarnya merupakan basis massa yang solid berbasis lintas kelas yang terdiri atas kelas menengah, akademisi, kaum miskin kota, kalangan petani, lapisan priyayi birokrasi yang sebagian besar mengidentifikasi diri berideologi nasionalis abangan.⁹

Sejak didirikan Partai Demokrasi Indonesia terus menerus mengalami konflik internal. Pemerintah sering melakukan campur tangan pada setiap kongres yang diadakan PDI. Tidak dipungkiri bahwa pemerintah mempunyai calon tersendiri untuk jabatan ketua partai yang selalu bertentangan dengan anggota kehendak partai itu sendiri. Puncaknya terjadi pada Kongres IV Medan. Budi Hardjono saat itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang didukung pemerintah. Kongres berakhir ricuh, pemerintah mengambil alih melalui Mendagri Yogie S. Memed mengusulkan membentuk *caretaker*. Dalam rapat formatur yang dipimpin Latief Pudjosakti Ketua DPD PDI Jatim pada tanggal 25-27 Agustus 1993 akhirnya diputuskan susunan resmi *caretaker* DPP PDI.

Setelah gagalnya Kongres IV PDI yang berlangsung di Medan, muncul nama Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh warga PDI untuk tampil menjadi Ketua Umum. Megawati Soekarnoputri dianggap mampu menjadi kandidat ketua umum DPP PDI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada tanggal 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Megawati dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara *de facto*.

Untuk menyelesaikan konflik PDI, beberapa hari setelah KLB, Mendagri bertemu Megawati, DPD-DPD dan juga *caretaker* untuk menyelenggarakan Muas dalam rangka membentuk formatur dan menyusun kepengurusan DPP PDI. Akhirnya Musyawarah Nasional (Munas) dilaksanakan tanggal 22-23 Desember 1993 di

⁸ Daniel Dhakidae, *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009* cetakan 1 (Jakarta: Buku Kompas, 2004). Hal. 361

⁹ A. Watik Pratiknya, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi kita* (Jakarta: 2000). Hal. 72

Jakarta dan secara *de jure* Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI. Dalam Munas ini dihasilkan kepengurusan DPP PDI periode 1993-1998.

Berakhirnya Munas ternyata tidak mengakhiri konflik internal PDI. Kelompok Yusuf Merukh membentuk DPP PDI Reshuffle walau tidak diakui oleh pemerintah namun kegiatannya tidak pernah dilarang. Disamping itu kelompok Soerjadi sangat gencar melakukan penggalangan ke daerah-daerah dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan menggelar Kongres. Dari 28 pengurus DPP PDI, 16 orang anggota DPP PDI berhasil dirangkulnya untuk menggelar Kongres.

Kelompok Fatimah Achmad yang dikukung oleh Pemerinyah tetap menyelenggarakan Kongres pada tanggal 2-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Warga PDI yang setia mendukung Megawati demonstrasi besar-besaran pada tanggal 27 Juni 1996 memprotes Kongres rekayasa yang diselenggarakan oleh kelompok Fatimah Achmad, demonstrasi itu berakhir bentrok dengan aparat dan saat ini dikenal dengan “Peristiwa Gambir Berdarah”. Pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut. Pemerintah mengakui secara formal keberadaan DPP PDI hasil Kongres Medan dan menyatakan PDI hasil Kongres Medan sebagai peserta pemilu tahun 1997.

Masa pendukung Megawati mengadakan “Mimbar Demokrasi” di halaman kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro hingga pada tanggal 27 Juli 1996, kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang dikenal dengan peristiwa “Sabtu Kelabu 27 Juli” yang banyak menelan korban jiwa.

Pada tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI dibawah kepemimpinan Megawati menyelenggarakan Kongres V PDI yang berlangsung di Denpasar Bali. Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi. Meskipun pemerintah sudah berganti, namun yang diakui oleh Pemerintah adalah masih tetap PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Oleh karenanya agar dapat mengikuti pemilu tahun 1999, Megawati

mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istora Senayan Jakarta.

Pemilu tahun 1999 PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Dalam Sidang Paripurna MPR, Megawati terpilih sebagai wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih didalam sebagai presiden Republik Indonesia ke-4.

Setelah kongres I PDI Perjuangan tahun 2000, pada tahun 2001 Megawati diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia ke-5 menggantikan Kh Abdurahman Wahid yang diturunkan dalam sidang istimewa MPR-RI. Diangkatnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-5 membawa perubahan pada sikap politik PDI Perjuangan dan cap sebagai partai penguasa melekat di PDI Perjuangan.

Meski sebagai partai penguasa, PDI Perjuangan ternyata tidak mampu meraih kemenangan di dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004. PDI Perjuangan hanya mampu memperoleh suara di urutan kedua dengan 109 kursi di DPR.¹⁰

Dengan mengusung citra sebagai partai “wong cilik” dan mengidentifikasikan sang pemimpin Megawati sebagai “pengemban suara hati nurani rakyat”, PDI Perjuangan menuai keuntungan dari suasana melodramatik masyarakat Indonesia yang begitu terharu dan simpati dengan tekanan politik yang mereka alami pada masa akhir pemerintahan Soeharto. Hasilnya PDI Perjuangan pada 1999 memenangkan pemilu dengan perolehan 34% suara atau mendapat dukungan pemilih sekitar 34 juta suara. Namun demikian langkah Megawati untuk menjadi presiden RI sempat terhadang ketika keputusan sidang DPR/MPR RI pada Agustus 2001 untuk menggantikan Abdurahman Wahid sebagai Presiden RI.¹¹

¹⁰ Tim redaksi, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu 2009* (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008). Hal. 45-49.

¹¹ A. Watik, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi*. Hal. 72

Adapun yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang **Strategi Rekrutmen Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Di Kabupaten Batu Bara** peneliti akan melakukan penelitian serius dan mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi rekrutmen anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)
2. Apa yang menjadi hambatan dan peluang dalam proses rekrutmen anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) di Batu Bara.

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian atau kajian tentu mempunyai tujuan yang mendasari tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi rekrutmen anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)
2. Mengetahui yang menjadi hambatan dan peluang dalam proses rekrutmen anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) di Kabupaten Batu Bara

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang seputar partai politik, khususnya mengenai Strategi rekrutmen anggota PDI Perjuangan
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang strategi rekrutmen anggota PDI Perjuangan di Kabupaten Batu Bara

E. Batasan Istilah

1. Secara umum strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Strategi adalah rencana yang cermat untuk mencapai sasaran khusus yang diinginkan.¹²
2. Rekrutmen adalah proses dimana individu atau kelompok dilibatkan dalam peran-peran kelompok.
3. Anggota adalah orang atau badan yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia dan sebagainya).¹³
4. Partai PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia lahir dari hasil fusi 5 (lima) partai politik. Sebagai hasil fusi dari Partai Nasionalis Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan Murba.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Maksud dari kualitatif adalah menganalisis perilaku dan sikap politik yang tidak dapat atau tidak dianjurkan untuk dikuantifikasikan.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Batu Bara, yaitu terdiri dari tujuh kecamatan. Yang untuk mendapatkan data dan informasi dari Partai PDI Perjuangan.

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hal., 1340.

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan 4. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). Hal. 48

¹⁴ Lisa Harisson, *Metodologi Penelitian Politik* (Jakarta: Kencana 2009). Hal. 86

3. Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan selama proses penelitian ini berupa kata-kata dan dokumen, sebagaimana dalam penelitian kualitatif bahwa bahan utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan.¹⁵

Data yang berupa kata-kata dikumpulkan dengan teknik wawancara. Teknik wawancara adalah suatu cara atau kepandaian melakukan tanya jawab untuk memperoleh keterangan, informasi dan sejenisnya.

Data dan informasi tertulis dilakukan dengan teknik pengkajian dokumen seperti menanyakan kepada pengurus fraksi PDI P mengenai dokumen tersebut. Semua jenis data yang dikumpulkan di sini di gunakan oleh penyusun untuk kepentingan pendalaman atas rumusan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data penelitian yang dikumpulkan selama penelitian di atas menggunakan model analisis data kualitatif deskriptif. Proses analisis data berlangsung secara sirkuler selama penelitian selama penelitian berlangsung. Secara umum proses analisis data model ini menempuh langkah dan tahapan sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari data-data penelitian yang dikumpulkan di lapangan. Secara teoritis dalam penelitian kualitatif reduksi data diperlukan untuk membuat data penelitian lebih mudah diakses serta dipahami dan dideskripsikan dalam laporan penelitian.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994). Hal. 4

2) Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan temuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskripsi. Deskripsi laporan penelitian disusun guna menggabungkan seluruh data dan penelitian guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam sebuah bentuk yang utuh dan mudah dipahami. Sehingga bagi peneliti dapat memahami apa yang berlangsung untuk menarik kesimpulan penelitian. Pada hakikatnya, langkah kedua pada tahapan penyajian data penelitian ini adalah juga merupakan bagian dan rangkaian yang tidak terpisah dari proses analisis data penelitian.

3) Menarik Kesimpulan

Setelah data penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi, maka selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan pada tahap-tahap awal bersifat longgar tetapi terbuka untuk dikritisi. Selanjutnya akan berkembang menjadi kesimpulan akhir yang bersifat final setelah melalui proses pemeriksaan yang berkelanjutan. Proses verifikasi dalam hal ini bertujuan untuk melakukan tinjauan ulang terhadap seluruh bahan dan informasi penelitian yang dikumpulkan dipandang telah jenuh maka penarikan kesimpulan final harus dilakukan. Jika masih diperlukan, data dan informasi tambahan dicari kembali.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan hasil laporan penelitian disusun dalam lima bab. Pembagian bab hanya bertujuan untuk pembahasan fokus isi mengikuti struktur umum penelitian ilmiah. Dimana diantara bab yang satu dengan bab yang lainnya adalah merupakan satu kesatuan yang utuh pada hakikatnya.

Adapun struktur yang menjadi isi penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Bab I: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Landasan Teori, Jenis-jenis Partai, Ideologi Partai Politik, Tujuan Partai Politik, dan Kaderisasi Politik atau Rekrutmen Politik.

Bab III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Profil Batu Bara, Demografi dan Geografi Batu Bara.

Bab IV: Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Visi dan Misi, Makna Lambang PDI Perjuangan, Tujuan PDI Perjuangan, Platform PDI Perjuangan dan Hasil Penelitian Strategi Rekrutmen Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Di Kabupaten Batu Bara.

Bab V: Penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran, serta bagian akhir dilampirkan daftar bacaan dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Defenisi Partai Politik

Partai politik dalam dunia perpolitikan, khususnya dalam politik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antar parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.¹⁶

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan seta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai-partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik terlahir untuk mewujudkan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikutsertakan dalam proses politik. Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian proses artikulasi kepentingan tersalurkan melalui partai politik.

Berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi partai politik bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Defenisi partai politik telah dikemukakan oleh ahli politik, diantara menurut ahli politik Carl J. Friedrich:

¹⁶ Ramlam Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992). Hal. 113

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasa terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersikap adil serta materil. (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leader the control of a government, with the further objective of giving to member of the party, trough such control ideal and material benefits and advantages*).¹⁷

Kemudian Sigmund Neumann mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut:

Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A political party is the articulate organization of society's active political agent, those who are concerned with the control of governmental policy power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent view*).¹⁸

Menurut Ramlan Surbakti menyatakan bahwa partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang telah mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.¹⁹

¹⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hal. 404

¹⁸ *Ibid.*, hal. 404

¹⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Hal. 116

Dalam undang-undang No 2 tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah.

Dari berbagai penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan menjadi penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memberikan informasi secara *bottom up* dan *top down*.

B. Jenis-Jenis Partai

Partai massa atau lindungan (*patronage*) dan partai kader. Partai massa adalah partai yang mengandalkan suara dengan cara memobilisasi massa untuk memilih partainya sehingga dapat memenangkan dalam setiap pemilu. Partai ini biasanya merupakan gabungan beberapa partai guna memperjuangkan kepentingan yang sama.²⁰ Oleh karena itu, sering kali partai politik ini merupakan gabungan dari berbagai aliran politik yang berbeda dalam masyarakat yang sepakat untuk berada dalam lindungan partai tersebut untuk memperjuangkan program-program yang pada umumnya sangat luas, umum dan kabur. Dikatakan umum, luas dan kabur karena program-program partai itu harus mencakup semua kepentingan dari berbagai aliran

²⁰ Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam Teori dan Praktik di Indonesia* Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). Hal. 13

dan kelompok politik yang ada yang kadangkala berbeda, bahkan bertentangan namun harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

Kelemahan partai tipe ini ialah manakala menghadapi krisis ataupun pembagian kursi dan jabatan dalam mana masing-masing aliran politik yang ada berusaha memaksakan keinginannya sendiri, sehingga mengancam keutuhan partai politik tersebut. Ketidakpuasan satu kelompok atau aliran politik tertentu akan dapat mengganggu keutuhan partai. Contoh partai lindungan ini ialah antara lain Partai UMNO (Barisan Nasional) di Malaysia yang menghimpun etnis Melayu, Cina, dan India, dan Partai Golongan Karya.²¹

Sedangkan partai kader adalah partai yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Karena itu partai kader sifatnya berjenjang dan menegakkan aturan partai tanpa pandang bulu.²² Pimpinan partai politik yang demikian ini selalu memelihara doktrin partai, mengadakan seleksi keanggotaan melalui kaderisasi yang teratur dan intensif, dan apabila ada anggota yang melanggar doktrin dan tata tertib partai maka anggota yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi berupa peringatan sampai pada pemecatan.

Biasanya struktur organisasi partai tipe ini rapi dan bersifat hierarkis, sehingga jalur perintah dan tanggung jawab tampak dengan jelas. Karena sifatnya yang demikian itulah, partai tipe ini sering disebut sebagai partai politik yang bersifat elitis. Contoh partai politik kader ini adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) di era Orde Lama dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di era reformasi.²³

Klasifikasi partai politik dapat didasarkan atas beberapa hal antara lain: Dari segi komposisi, fungsi keanggotaan dan dasar ideologinya. Dalam klasifikasi berdasarkan komposisi dan fungsi keanggotaan, partai politik dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu partai kader dan partai massa.

²¹ Elly M. setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* Cet. 1, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013). Hal. 289

²² Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam Teori dan Praktik di Indonesia*. Hal. 14

²³ Elly M. setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*. Hal. 289

Partai kader biasanya lebih mementingkan keketatan, disiplin dan kualitas anggota. Kelemahan partai kader ini terutama dalam mencari dukungan, biasanya mereka kalah dalam persaingan mengumpulkan jumlah dukungan di masyarakat luas karena dianggap anggota partai kader terbatas pada kelompok-kelompok tertentu.

Partai massa merupakan kebalikan dari partai kader karena mereka lebih menekankan pada pencarian jumlah dukungan yang banyak di masyarakat atau dengan kata lain lebih menekankan aspek kuantitas. Kelemahan partai massa adalah bahwa disiplin anggota biasanya lemah, juga lemahnya ikatan organisasi sesama anggota, bahkan kadang kala tidak saling kenal, karena luasnya dukungan dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat.

Perkembangan partai massa sebenarnya berawal dari partai kader. Partai-partai kader yang sebelumnya masih terbatas keanggotaannya pada kalangan tertentu mulai membuka diri untuk keanggotaan yang lebih luas.

Pada tahun 1966, Otto Von Kirchheimer menambahkan lagi sebuah jenis partai berdasarkan keanggotaannya, yang disebut partai catch all. Partai jenis ini adalah perkembangan lebih lanjut dari partai massa.

Pada tahun 1980, Richard S. Katz dan Peter Mair menambahkan lagi sebuah jenis partai berdasarkan perkembangan kecenderungan negara-negara barat untuk memberikan subsidi bagi partai-partai politik yang ada dan meningkatnya peran media elektronik dalam kampanye pemilu. Katz dan Mair mengutip kesuksesan kerja sama tiga partai politik Austria (*the socialist party, the people's party and the freedom party*), yang berhasil mempertahankan kemenangannya dalam pemilu selama bertahun-tahun.

Klasifikasi partai politik dapat juga didasarkan atas sifat dan orientasinya. Dalam hal ini partai politik dibagi atas partai perlindungan dan partai ideologi atau asas. Partai perlindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor, meskipun pada tingkat local sering kali cukup ketat.

Partai idiologi atau partai asas adalah partai yang mengikat diri pada idiologi atau asas tertentu dalam menyusun program kerja partainya. Klaus Von Beyme pada tahun 1985 dalam bukunya *Political Parties in western Democracies*, mengklasifikasikan 9 kelompok partai yang selama ini berkembang di Eropa Barat berdasarkan idiologinya yaitu:

1. Partai liberal dan radikal
2. Partai konservatif
3. Partai sosialis dan sosial demokrat
4. Partai Kristen demokrat
5. Partai komunis
6. Partai agraris
7. Partai regional dan etnis
8. Partai ekstrim kanan
9. Gerakan ekonomi/lingkungan

Von Beyme tidak menutup kemungkinan bahwa ada partai-partai politik dengan idiologi lain yang kemudian tidak bisa dimasukkan dalam klasifikasi yang ia buat. Orientasi para pemilih tersebut bisa dikelompokkan menjadi empat klasifikasi yang muncul dalam masyarakat bersamaan dengan perkembangan sosial politik di negara itu sendiri yaitu:

1. Pusat daerah
2. Negara gereja
3. Ladang industri
4. Pemilik modal pekerja²⁴

C. Ideologi Partai Politik

Para pengamat politik berpendapat bahwa cara yang paling mutakhir untuk melihat peranan ideologi partai di Indonesia, adalah khususnya mengidentifikasi

²⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai_politik 06 May 2017 pukul 20.30 WIB

konflik antar partai politik dan umumnya melihat di antara keseluruhan kekuatan politik. Merujuk pada pendapat Duverger, ada tiga tipe konflik partai politik, yaitu: 1) konflik yang sama sekali tidak memiliki dasar dan prinsipiell, 2) konflik yang timbul karena adanya perbedaan mengenai bagian-bagian dari suatu prinsip, tetapi tidak mengenai prinsip itu sendiri, dan 3) konflik yang sama sekali bertolak dari suatu prinsip dasar. Jika pertikain yang pertama berkisar masalah-masalah praktis seperti pengurangan subsidi BBM antara partai Demokrat dan PDI P di Indonesia, dan jenis kedua berkisar mengenai persoalan-persoalan yang setengah prinsipiell seperti perbedaan pandangan antara partai Demokrat dan PDI P mengenai ada tidaknya unsur-unsur korupsi tentang kasus Bank Century maka yang terakhir adalah mempersoalkan dasar negara atau UUD 1945.²⁵

Jika diperhatikan perdebatan di dalam Dewan Konstituante hasil pemilu tahun 1955, yang mempermasalahkan tentang dasar negara, apakah didasarkan pada Islam nasionalisme atau kolaborasi dari berbagai ideologi yang dianut oleh partai-partai di Indonesia, seperti Pancasila, maka pokok permasalahan yang lebih menonjol dalam perhelatan politik di masa itu adalah ideologi. Demikian pula, pengelompokan kekuatan politik di era 1960-an oleh Ir. Soekarno ke dalam tiga kelompok partai, yakni yang menganut paham nasionalisme, seperti partai-partai PNI, Partai Indonesia Raya (PIR), Partai Rakyat Nasional (PRN): menganut ajaran agama Islam sebagai ideologi seperti Masyumi, PSII, NU, Perti, dan pengikut-pengikut Marx dengan PKI sebagai partai utama.²⁶

Ketidaksepakatan antara Dewan Konstituante dan Soekarno menunjukkan bahwa keduanya tidak mampu mengolaborasikan keragaman ideologi yang ada pada setiap partai politik yang ada. Walaupun Ir. Soekarno lebih berhasil dari konstituante dengan mengetengahkan Pancasila sebagai ideologi yang meliputi semua paham di dalam masyarakat, namun Pancasila itu sendiri lebih diartikan sebagai federasi ideologi daripada menggambarkan suatu masyarakat yang hendak dicapai secara

²⁵Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi..* Hal. 303.

²⁶*Ibid.*, Hal. 304.

utuh. Setidaknya itulah gambaran yang ditafsirkan oleh Soekarno sebagai penggabungan dari nasionalisme, agama, dan komunis (NASAKOM). Kenyataan ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya faktor ideologi inilah yang menjadi dasar pokok dari pertikaian di antara partai di Indonesia. Kuatnya pengaruh ideologi di dalam kehidupan kepartaian di Indonesia, berakibat pada sukarnya kerja sama di antara elit partai dalam penciptaan suatu consensus. Hal itu disebabkan belum adanya suatu ideologi yang mampu menyalurkan elit ke dalam suatu persetujuan yang mendasar mengenai politik, kenegaraan, dan kemasyarakatan.²⁷

Dengan demikian ideologi yang semula diharapkan menjadi alat penggerak untuk mencapai cita-cita dalam bernegara, justru berbalik dengan tujuan awalnya. Masyarakat jadi sukar digerakkan pada suatu arah pencapaian awal negara Indonesia berdiri. Kendati Soekarno dengan pancasilanya telah mencoba mengarahkan masyarakat Indonesia pada penciptaan Indonesia sebagai pemimpin dunia, ternyata penafsiran akan pancasila masih banyak mengandung kelemahan. Keadaan ini memunculkan dugaan para ahli bahwa, kelemahan peranan ideologi di dalam kehidupan partai berasal dari penggunaan ideologi sebagai alat pengukur tingkah laku politik, bukan pemakaian ideologi sebagai gambaran kehidupan manusia secara individual maupun berkelompok.²⁸

Akibatnya ideologi seolah-olah berperan sebagai hokum untuk menilai salah dan benar suatu tindakan manusia. Padahal di sisi lain, ideologi adalah kerangka pikiran mengenai susunan masyarakat yang penuh keterbatasan. Sikap dan pandangan ini, kurang memberi kesempatan bagi usaha-usaha untuk menguraikan ideologi ke dalam rencana yang diukur dengan keperluan hidup sehari-hari. Lalu orang tetap berada di dalam pembicaraan yang abstrak bukan hal yang konkret, artinya sumber konflik masih berkisar pada perdebatan tentang bentuk dan tujuan negara, sementara masyarakat menunggu hasil konkret di dalam bentuk keperluan hidup.²⁹

²⁷ *Ibid.*, Hal. 304.

²⁸ *Ibid.*, Hal. 305

²⁹ *Ibid.*, Hal. 305

Tampaknya hal yang diperlukan oleh partai politik di Indonesia adalah lebih banyak berusaha menafsirkan ideologi masing-masing ke dalam rencana operasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga memungkinkan partai masih bisa bertahan dalam menghadapi perubahan politik di Indonesia. Selain itu, partai politik dituntut untuk mampu mengalihkan sumber pertentangan di antara partai dari masalah ideologi kepada rencana. Langkah ini akan berimplikasi pada dua keuntungan yaitu: 1) memperoleh intensitas konflik sebab apapun alasannya, saat ini masyarakat Indonesia memerlukan kehidupan perbaikan kehidupan dari pihak manapun. Dan 2) partai bisa meningkatkan kemampuannya di dalam melihat dan mengembangkan masyarakat melalui usaha nyata daripada yang abstrak. Hal itu senada dengan Weatherbee, “Negara-negara berkembang menghadapi berbagai tujuan masyarakat kebebasan politik, modernisasi ekonomi dan perubahan masyarakat yang menyebabkan elit politik harus melakukan tindakan yang sesuai dengan etos masyarakat dan lingkungan.” Karena itu (negara-negara tersebut memerlukan) ideologi modern yang berorientasi kepada aksi dan berisi program yang menggambarkan arah serta perubahan.³⁰

D. Tujuan Partai Politik

Tujuan dari partai politik di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang. Pengaturan tujuan ini adalah supaya partai politik di Indonesia yang berjumlah sangat banyak itu bisa berdiri dan bergerak ke arah yang sama yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur walaupun dibungkus dengan ideologi dan platform yang berbeda. Tujuan dari partai politik di Indonesia, dalam UU Nomor 2 tahun 2008 dibagi menjadi tujuan khusus dan tujuan umum yang tercantum dalam pasal 10 ayat 1 dan 2, yaitu:

³⁰ *Ibid.*, Hal. 305

1. Tujuan Umum Partai

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Tujuan Khusus Partai

Mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila.³¹

E. Kaderisasi Politik atau Rekrutmen Politik

Proporsi individu dalam suatu masyarakat tertentu yang aktif pada tingkatan tertinggi dalam partisipasi politik yaitu mereka yang menduduki jabatan-jabatan politik dan administrative hanya merupakan kelompok minoritas dari penduduk seluruhnya. Lagi pula, proporsi ini boleh dikatakan hamper-hampir tidak bertambah bila mereka yang mencari jabatan politik dan jabatan administrative dimasukkan, seperti yang seharusnya jika melakukan penilaian terhadap perekrutan terhadap politik yang efektif. Kenyataan penunjukan bahwa mereka yang secara politik paling aktif, merupakan minoritas dalam masyarakat dan mereka itu besar artinya disebabkan oleh dua alasan pertama, karena hal tersebut merupakan cirri utama dari

³¹ Daniel Dhakidae, *Partai-Partai Politik Indonesia..* Hal.367-368

semua sistem politik, dengan kemungkinan pengecualian sistem-sistem yang ada dalam beberapa masyarakat primitif, dan kedua, karena hal itu merupakan basis dari sejumlah teori penting yang berusaha menjelaskan bekerjanya sistem-sistem politik sehubungan dengan oligarki-oligarki, kaum elit, dan kelas-kelas.³²

Akan tetapi, bagaimanapun juga keabsahan teori-teori ini, salah satu perhatian utama dari sosiologi politik, adalah untuk menyelidiki dan menerangkan hal perekrutan orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik, apakah hal itu dilakukan dengan menduduki jabatan politik seperti Perdana Menteri atau Presiden, anggota pemerintah atau menjabat Gubernur negara bagian, anggota Dewan, atau Walikota, ataupun dengan menjadi anggota dalam birokrasi nasional atau birokrasi lokal dan menjadi pegawai sipil, administrator negara bagian atau pejabat pemerintah lokal. Demikian pula, perhatian tersebut jadi meluas sampai tertuju pada personil partai yang tengah berkuasa dan hierarki pemerintah dalam masyarakat totaliter.³³

Salah satu fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu mencari anggota-anggota yang baru dan mengajak mereka yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dalam hal ini, rekrutasi atau rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin. Dengan demikian, berarti masalah rekrutasi atau rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah kaderisasi dan partisipasi politik.³⁴

Secara umum, bila rekrutmen menyangkut soal proses pencarian anggota-anggota yang baru dari suatu partai politik, maka kaderisasi atau sering disebut sebagai rekrutasi elite politik, lebih menitik beratkan pada masalah proses mencari

³² Michael Rush dan Phillip Althoef, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rajawali, 1986). Hal. 183

³³ *Ibid.*, Hal. 184

³⁴ Adriana Elisabeth Sukanto dkk, *PDI Dan Prospek Pembangunan Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991). Hal. 77-78

dan mempersiapkan mereka yang akan tampil sebagai pemimpin (elite) politik, termasuk di dalamnya pemimpin-pemimpin partai politik.³⁵

Menurut Prof. Myron Weiner ada lima hal yang menyebabkan partisipasi politik di kalangan masyarakat semakin meluas. Kelima hal yang dimaksud adalah modernisasi, perubahan-perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum cendekiawan dan komunikasi massa modern, konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik, serta keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.³⁶

Tingkat keaktifan yang tinggi dan rendah bagi seseorang untuk berpartisipasi politik dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti pendidikan tinggi, status sosial ekonomi, dan keanggotaan dalam parpol. Dengan kata lain, para anggota partai politik termasuk salah satu lapisan yang tinggi keaktifannya untuk berpartisipasi politik.

Jadi, secara teoritis mereka yang dapat menjadi anggota suatu parpol hanya mereka yang memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan yang dimiliki partai yang bersangkutan, serta menyetujui kebijaksanaan yang di tempuh partai itu. Dalam prakteknya memang dapat terjadi yang lain dengan teori. Misalnya, ada sebagian orang yang memasuki suatu partai sekedar mencari status sosial ekonomi. Atau ada pula mereka yang memasuki suatu parpol dengan maksud mengubah orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang dimiliki parpol.

Akan tetapi, pada hakikatnya perihal rekrutasi dan kaderisasi, setiap parpol (dan organisasi-organisasi yang lain) mempunyai cara-cara dan pola sendiri. Pola rekrutmen dan kaderisasi melalui bekas unsure dan ormas *onderbouw* biasanya dilakukan oleh partai-partai politik yang menganut sistem keanggotaan tidak langsung. Sedangkan sistem keanggotaan langsung dianut oleh partai-partai yang tidak mempunyai ormas *onderbouw*. Dengan kata lain, keanggotaan parpol bersifat

³⁵ Ibid., Hal. 77-78

³⁶ Ibid., Hal. 77-78

perorangan. Menurut sistem keanggotaan tidak langsung, maka ormas yang berfungsi merekrut anggota dan mencetak kader-kader, kemudian menyalurkannya ke partai politik. Sementara itu pada sistem keanggotaan langsung, partai menggunakan ranting-ranting dan cabang-cabangnya sebagai unit organisasi terkecil untuk memelihara hubungan antara anggota dan partai, yang sekaligus berfungsi melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi.³⁷

Suatu metode perekrutan yang sudah berjalan lama, yang umum terdapat pada banyak sistem politik, adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan. Penggulingan dengan kekerasan suatu rejim politik, apakah hal itu berlangsung dengan revolusi, intervensi militer dari luar, pembunuhan atau kerusuhan rakyat, sering kali walaupun tidak selalu bisa dijadikan sarana untuk mengefektifkan perubahan radikal pada personil di tingkat-tingkat lebih tinggi dalam partisipasi politiknya. Akibat yang paling nyata dari metode-metode itu adalah: pergantian para pemegang jabatan politik akan tetapi perubahan-perubahan dalam personil birokrasi biasanya menimbulkan hasil lebih lambat, terutama bila berlangsung dalam masyarakat yang kompleks dan sangat maju.

Selain cara-cara perekrutan yang biasanya diasosiasikan dengan perubahan-perubahan personil yang ekstensif, terdapat juga cara lain yang diasosiasikan dengan perekrutan yang dilakukan berkesinambungan dari tipe personil yang sama. Salah satunya adalah patronage, yaitu sistem yang tetap penting (sampai sekarang) di berbagai negara berkembang yang terdapat pada zaman dahulu di Amerika Serikat dan Inggris. Patronage merupakan bagian dari suatu sistem korupsi yang rumit, yang merasuki banyak bidang kehidupan masyarakat di Inggris. Sistem ini sebagian merupakan metode yang cukup mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui berbagai taraf pengontrolan terhadap hasil-hasil dari pemilihan umum, dan merupakan dukungan dalam parlemen yang berlangsung di antara beberapa pemilihan umum. Dan sebagian lagi merupakan sarana bagi perekrutan politik,

³⁷ Adriana Elisabeth Sukamto dkk, *PDI Dan Prospek..* Hal. 77-78

karena untuk masuk menjadi anggota parlemen hamper selalu dapat dipastikan harus melalui sistem patronage.³⁸

Secara normative, kaderisasi adalah proses bahwa rekrutmen dalam partai politik akan menghasilkan orang-orang baru yang kompeten dan menjamin sirkulasi elit partai. Sesuai peran partai politik untuk berkiprah dalam peran partai politik dan pemerintahan, pada tahap selanjutnya kader-kader akan diarahkan untuk menjadi kandidat guna mengisi jabatan publik. Sumber kader diperoleh melalui beberapa cara. Pertama, dari partai politik melalui dasar pendidikan politik dan even-even, kedua, dari organisasi sayap yang sengaja dibentuk untuk menjaring calon kader maupun ormas sebagai *onderbow* partai, terutama dari generasi muda yang potensial. Ketiga, dari organisasi mahasiswa ataupun organisasi masyarakat yang seideologi dengan partai.

Secara teoritis, partai politik mencalonkan non kader sebagai kandidat jabatan publik adalah menunjukkan macetnya proses kaderisasi ini, terutama di tingkat lokal. Ada beberapa sebab macetnya kaderisasi ini. Pertama, kurangnya kuantitas dan kualitas kader yang masuk ke dalam partai. Kedua, kader-kader yang masuk ke partai tidak mempunyai kappabilitas sebagai politisi. Mereka masuk ke partai cenderung sebagai simpatisan, tanpa latar belakang yang memadai untuk berkiprah dalam politik maupun pemerintah. Ketiga, mekanisme penjurangan kaderisasi yang berlangsung dalam partai cenderung tidak transparan. Penempatan person pada pos-pos tertentu dalam partai bukan berdasarkan kapabilitas dan keahlian, namun pada kedekatan dengan elit maupun kemampuan untuk menyumbang dana. Akibatnya, kader-kader yang mempunyai kemampuan namun minim dana, tidak bisa meniti jenjang karir secara mulus.

Beberapa sebab-sebab diatas membuat partai-partai pemenang pemilu mengalami krisis ketersediaan kader handal. Ketika dihadapkan pada momentum Pilkada, mau tidak mau partai harus bersifat pragmatis dengan mengambil kandidat

³⁸ Michael Rush dan Phillip, *Pengantar Sosiologi.*, Hal. 187-188

yang berasal dari luar partai. Alasannya, aktor tersebut mempunyai elektabilitas tinggi, ataupun kemampuan dana yang memadai.³⁹

³⁹ Helmi Mahadi, *Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDI-P Pada Pilkada, Kabupaten Sleman* (Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 2). Hal. 101. 9 Mei 2017 pukul 05.22 WIB

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Batu Bara

Perjalanan Sultan Aceh “Sultan Iskandar Muda” ke Johor dan Malaka pada tahun 1612 dapat dikatakan sebagai awal dari sejarah Asahan. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan-sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai, yang kemudian dinamakan ASAHAN. Perjalanan dilanjutkan ke sebuah Tanjung yang merupakan pertemuan antara sungai Asahan dengan sungai Silau, kemudian bertemu dengan Raja Simargolang. Di tempat itu juga, Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah pelataran sebagai “Balai” untuk tempat menghadap, yang kemudian berkembang menjadi perkampungan. Perkembangan daerah ini cukup pesat sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka, sekarang ini dikenal dengan Tanjung Balai.

Dari hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan salah seorang puteri Raja Simargolang lahirlah seorang putera yang bernama Abdul Jalil yang menjadi cikal bakal dari kesultanan Asahan. Abdul Jalil dinobatkan menjadi Sultan Asahan I. pemerintahan kesultanan Asahan dimulai tahun 1630 yaitu sejak dilantiknya Sultan Asahan yang I sampai dengan XI. Selain itu di daerah Asahan, pemerintahan juga dilaksanakan oleh datuk-datuk di wilayah Batu Bara dan ada kemungkinan kerajaan-kerajaan kecil lainnya.

Tanggal 22 September 1865, kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda. Sejak itu, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan/Tanjung Balai dipimpin oleh seorang Kontroler, yang diperkuat dengan Geuvements Besluit tanggal 30 September 1867, nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai dan pembagian wilayah pemerintahan dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Onder Afdeling Batu Bara
2. Onder afdeling Asahan
3. Onder afdeling Labuhan Batu

Kerajaan Sultan Asahan dan pemerintahan Datuk-datuk di wilayah Batu Bara tetap diakui oleh Belanda, namun tidak berkuasa penuh sebagaimana sebelumnya. Pemerintahan Belanda berhasil ditundukkan Jepang (tanggal 13 Maret 1942), sejak saat itu Pemerintahan Fasisme Jepang disusun menggantikan Pemerintahan Belanda. Pemerintahan Fasisme Jepang dipimpin oleh Letnan T. Jamada dengan struktur pemerintahan Belanda yaitu Asahan Bunsyu dan bawahannya Fuku Bunsyu Batu Bara. Selain itu, wilayah yang lebih kecil di bagi menjadi Distrik yaitu Distrik Tanjung Balai, Kisaran, Bandar Pulau, Pulau Rakyat dan Sei Kepayang.

B. Demografi dan Geografi Batu Bara

Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang baru terbentuk pada tahun 2007, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan. Batu Bara berada di kawasan pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka.

Kabupaten Batu Bara menempati area seluas 90.496 Ha yang terdiri dari 7 kecamatan serta 100 Desa/Kelurahan. Wilayah Kabupaten Batu Bara di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Asahan, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, daerah Lima Puluh merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 239,55 km² atau 26,47% dari luas total Batu Bara. Sedangkan Kecamatan Medang Deras merupakan wilayah terkecil dengan luas 65,47 km² atau 7,23% dari luas total Batu Bara.

1. Iklim

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Menurut catatan pos pengukuran Perkebunan Sei Bejangkar, pada tahun 2010 terdapat 111 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak 832 mm. curah hujan terbesar terjadi pada bulan November yaitu 329 mm dengan hari hujan sebanyak 10 hari. Sedangkan curah hujan paling kecil terjadi pada bulan Juni sebesar 160 mm dengan hari hujan 3 hari. Rata-rata curah hujan tahun 2010 mencapai 152,67 mm/bulan.

2. Pemerintahan

1) Wilayah administratif

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Batu Bara terdiri dari 7 kecamatan, 93 desa dan 7 kelurahan yang terdiri dari 1 desa swadaya mula, 24 desa swakarya mula, 7 swakarya madya, 63 desa swasembada mula dan 5 desa swasembada madya yang seluruhnya telah definitif. Dari 100 kepala desa atau lurah, 11 diantaranya dikepalai oleh perempuan atau sekitar 11%.

2) DPRD

Pemilihan umum legislative tahun 2009 menghasilkan 35 orang anggota DPRD Kabupaten Batu Bara yang terdiri dari 5 orang dari fraksi Partai Golkar, 4 orang dari fraksi PDI Perjuangan, 5 orang dari fraksi PPP, 2 orang anggota fraksi PAN, 2 orang dari fraksi PKS, 1 orang dari fraksi PBR, 3 orang dari fraksi partai Demokrat, 2 orang dari fraksi PBI, 2 orang fraksi PDS, 2 orang dari fraksi Hanura, 2 orang dari fraksi PPRN, 2 orang dari fraksi PDK, dan masing-masing 1 orang dari fraksi Partai Patriot, PKPI dan PDP.

3) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah PNS otonomi daerah di Kabupaten Batu Bara tahun 2010 berjumlah 4610 orang. Jika dirinci menurut golongan, sebagian besar merupakan golongan III yaitu mencapai 44,40% dan yang terkecil adalah golongan I yaitu 9,14%. Dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar adalah tamatan S1 sebesar 40,24%, SLTA sebesar 29,31% dan Akademi (D1, D2, dan D3) dengan persentase sebesar 28,26%.

4) Pertahanan

Pada tahun 2010 BPN Kabupaten Asahan telah menerbitkan sebanyak 1458 sertifikat tanah dalam prosedur rutin. Dari jumlah tersebut 352 buah berstatus hak milik, 1101 buah hak peralihan dan sisanya 86 buah berstatus hak guna bangunan, hak pakai dan hak guna usaha. BPN juga menerbitkan 1185 sertifikat tanah berstatus hak milik dengan prosedur proyek. Data tersebut mencakup kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Asahan.

3. Penduduk dan Ketenagakerjaan

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Batu Bara (termasuk asahan) berdasarkan hasil sensus penduduk 2000 adalah 935.855 jiwa termasuk penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap dan termasuk urutan ketiga terbesar se-Sumatera Utara setelah Kabupaten Deli Serdang dan kota Medan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 1990-2000 berdasarkan angka terakhir sensus penduduk 2000 adalah 0,58% per tahun.

Jumlah penduduk Batu Bara keadaan bulan Juni tahun 2010 sebesar 375.885 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 415 jiwa per km². Sebagian besar penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan yaitu sebesar 68,08% dan sisanya 31,92% tinggal di daerah perkotaan. Jumlah rumah tangga sebanyak 86.292 rumah tangga dan setiap rumah tangga rata-rata dihuni oleh sekitar 4,4 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2010 lebih banyak dari penduduk perempuannya dengan persentase

sebesar 50,37% dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,49 yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat kira-kira 101 penduduk laki-laki.

Bila dilihat dari kecamatan maka kecamatan lima puluh merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 22,66% sedangkan kecamatan Sei Balai adalah yang terkecil yaitu 7,15%. Untuk kecamatan terdapat urutan pertama adalah kecamatan Medang Deras dengan kepadatan mencapai 732 jiwa per km² selanjutnya kecamatan Air Putih dengan kepadatan 647 jiwa per km² dan yang paling jarang adalah kecamatan Sei Balai yaitu 289 jiwa per km².

Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur

Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Batu Bara 2010

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Terhadap Total
0-4	22.392	20.810	43.202	11,49
5-9	22.358	20.966	43.324	11,53
10-14	21.310	20.706	42.016	11,18
15-19	19.165	18.054	37.219	9,90
20-24	15.558	15.100	30.658	8,16
25-29	15.760	15.591	31.351	8,34
30-34	13.788	13.553	27.341	7,27
35-39	12.507	12.565	25.072	6,67
40-44	11.186	11.560	22.746	6,05

45-49	9.983	10.438	20.421	5,43
50-54	8.944	8.516	17.460	4,65
55-59	6.228	5.952	12.180	3,24
60-64	3.463	3.814	7.277	1,94
65-70	2.461	3.117	5.578	1,48
71-74	1.935	2.553	4.488	1,19
75+	2.290	3.262	5.552	1,48
Jumlah	189.328	186.557	375.885	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan

Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 34,20%, 15-74 tahun sebesar 64,32% dan usia 75 tahun keatas sebesar 1,48% yang berarti jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif dengan rasio beban ketergantungan sebesar 64,32 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 64 orang penduduk usia nonproduktif.

Penduduk batu bara yang menganut agama islam pada tahun 2009 sebesar 85,40%, katolik sebesar 2,27%, protestan sebesar 11,56%, budha sebesar 0,73% dan hindu sebesar 0,04%. Untuk suku bangsa yang terbanyak adalah jawa sebesar 39,32% kedua suku melayu sebesar 38,05% dan urutan ketiga adalah suku batak sebesar 18,41% sedangkan sisanya adalah suku minang, banjar, aceh dan lain-lain.

2) Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) batu bara tampaknya meningkat pada tahun 2010. Pada tahun 2009 TPAK di batu bara 64,23% meningkat menjadi 64,48%

di tahun 2010. Jika dilihat dari status pekerjaannya, 26,89% penduduk yang berkerja di batu bara adalah buruh atau karyawan. Penduduk yang berusaha dengan dibantu anggota keluarga mencapai 20,02%, sedangkan penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga mencapai 13,27%. Hanya 1,53% penduduk batu bara yang menjadi pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap atau bukan anggota keluarganya.

Jumlah penduduk batu bara yang merupakan angkatan kerja pada agustus 2010 adalah sebanyak 175,88 ribu jiwa yang terdiri dari 161,89 ribu jiwa terkategori bekerja dan sebesar 13,99 ribu jiwa terkategori mencari kerja dan tidak bekerja (pengangguran terbuka). Penduduk batu bara yang bekerja ini sebagian besar bekerja pada sektor pertanian yaitu 79,328 jiwa. Sektor kedua terbesar dalam menyerap tenaga kerja di batu bara adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 33,077 jiwa.

Sektor lain yang cukup besar peranannya dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa-jasa, baik jasa perorangan, jasa perusahaan dan jasa pemerintahan yaitu sebesar 19,805 jiwa. Selebihnya bekerja disektor penggalian dan pertambangan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2010 sebanyak 1,639 orang yang terdiri dari 867 pencari kerja laki-laki dan sisanya 772 adalah pekerja perempuan dan 1,212 orang diantaranya sudah ditempatkan.

4. Sosial

1) Pendidikan

Penyediaan sarana fisik pendidikan dan jumlah tenaga guru yang memadai merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan masyarakat. Pada tahun 2009 terdapat:

- 38 buah taman kanak-kanak dengan jumlah murid 4 890 orang dan guru sebanyak 186 orang.
- Sementara itu untuk sekolah dasar terdapat 271 sekolah dengan jumlah murid dan guru masing-masing 13 028 orang dan 2 822 orang.
- Untuk tingkat Lanjutan pertama (SLTP) terdapat 89 sekolah, 17 017 orang murid dan 1 336 orang guru.
- Pada tahun yang sama jumlah sekolah lanjutan atas (SLTA) umum terdapat 35 sekolah dengan jumlah murid 9 011 orang dan guru 670 orang.
- Untuk SLTA kejuruan terdapat 9 sekolah, 185 orang guru dan 2 669 orang murid.

Rasio murid terhadap sekolah untuk tingkat SD adalah 48 murid per sekolah dengan rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Sei Suka dan terendah di Kecamatan Lima Puluh masing-masing 75 dan 31 murid terhadap sekolah adalah 191 murid per sekolah. Rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Air Putih yaitu 276 murid per sekolah dan terendah di Kecamatan Sei Balai yaitu 93 murid per sekolah.

Sementara untuk tingkat SLTA (SMU + SMK) rasio murid terhadap sekolah adalah 257 murid per sekolah. Rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Sei Suka (475 murid per sekolah) dan terendah di Kecamatan Sei Balai yaitu 101 murid per sekolah.

Selain itu di Batu Bara juga terdapat sekolah agama (madrasah) yang setara dengan sekolah umum yaitu:

- 30 madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan 4.908 murid dan 314 guru
- 38 Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan 7.733 murid dan 627 guru
- 13 Madrasah Aliyah (MA) dengan 3.177 murid dan 229 guru

2) Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sangat membantu

dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di Kabupaten Batu Bara hanya terdapat satu buah rumah sakit milik swasta yaitu milik PT Inalum di Kecamatan Sei Suka. Sedangkan puskesmas yang ada berjumlah 11 buah juga terdapat Puskesmas Pembantu dan Posyandu masing-masing berjumlah 63 dan 498 buah semuanya tersebar di setiap kecamatan. Sedangkan jumlah klinik mencapai 7 unit.

Tenaga medis yang tersedia di Kabupaten Batu Bara baik negeri maupun swasta ada 45 orang dokter umum, 12 orang dokter gigi dan 2 dokter spesialis. Sementara itu tenaga medis pemerintah lainnya seperti bidan ada 179 orang, perawat dan pembantu perawat ada 191 orang.

Di Kabupaten Batu Bara, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2009 jumlah PUS sekitar 63.235 dan dari jumlah tersebut 66,21% adalah akseptor aktif yang jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2008. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah pil, suntik dan IUD sedangkan klinik KB yang ada berjumlah 16 buah.

3) Agama

Sarana umat beragama juga mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2010 jumlah mesjid Batu Bara terdapat 231 buah, langgar/mushollah sebanyak 576 buah. Gereja protestan 168 buah, dan gereja katolik 37 buah. Jumlah jemaah haji yang berangkat dari Kabupaten Batu Bara yang dikoordinir pemerintah berjumlah 204 orang, angka ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 219 orang.

5. Pertanian

1) Tanaman Bahan Makanan

Pada tahun 2010 produksi padi sawah di Batu Bara mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 yaitu sekitar 22,49%. Produksi padi sawah tahun 2010

mencapai 171.461,6 ton dengan rata-rata produksi 50,10 kw/ha. Kecamatan dengan produksi padi terbesar adalah Lima Puluh dan Air Putih. Sedangkan produksi padi ladang pada tahun yang sama adalah nol karena di Batu Bara tidak ada yang mengusahakan padi ladang.

Produsen jagung terbesar di Batu Bara untuk tahun 2010 adalah Kecamatan Sei Suka dengan produksi sebesar 1.617 ton atau 41,62% dari total produksi jagung di Batu Bara yang mencapai 3.885 ton. Tanaman ubi kayu diusahakan di seluruh kecamatan di Batu Bara. Produksi tahun 2010 meningkat dibandingkan tahun 2009, dari 24.694 ton menjadi 25.048 ton.

Untuk tanaman bahan makanan lainnya seperti ubi jalar, kacang hijau dan kacang tanah mengalami penurunan sedangkan kacang kedelai mengalami peningkatan produksi pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009.

2) Holtikultura

Pada tahun 2010 produksi cabai di Batu Bara mencapai 19 397,40 ton dengan rata-rata produksi 97,57 kw/ha. Kecamatan dengan produksi cabe terbesar adalah Air Putih disusul Sei Suka dan Lima Puluh. Untuk produksi buah-buahan di Kabupaten Batu Bara yang paling banyak adalah buah pisang sebanyak 599,8 ton, buah mangga 587,1 ton, durian 77,0 ton, buah papaya 62,2 ton, buah jeruk 25,6 ton dan buah nenas 14,70 ton. Kecamatan dengan produksi pisang terbesar adalah Kecamatan Sei Balai disusul Sei Suka dan Kecamatan Medang Deras.

3) Perkebunan dan Kehutanan

a) Perkebunan rakyat

Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu sentra perkebunan di Sumatera Utara. Komoditi penting yang dihasilkan perkebunan di Kabupaten Batu Bara adalah kelapa sawit. Produksi karet pada tahun 2009 sebesar 117,30 ton. Kecamatan Talawi merupakan kecamatan penghasil karet terbesar di Batu Bara.

Tanaman kelapa sawit ditanam di seluruh kecamatan di Kabupaten Batu Bara. Produksi kelapa sawit TBS (Tanda Buas Segar) tahun 2009 terbesar 70 792,74 ton dengan total luas tanaman 8 654,50 ha. Tanjung Tiram merupakan kecamatan penghasil kelapa sawit terbesar di Batu Bara.

Produksi tanaman kelapa di Batu Bara tahun 2009 mencapai 5.210,10 ton dengan luas tanaman mencapai 8.569,45 ha. Kecamatan Tanjung Tiram merupakan penghasil kelapa terbesar di Batu Bara dengan total produksi 2.098,00 ton. Produksi coklat pada tahun 2009 sebesar 1.627,10 ton yang berarti menurun dibandingkan tahun 2008. Kecamatan Lima Puluh merupakan penghasil terbesar coklat di Batu Bara.

b) Perkebunan besar

Selain perkebunan yang dikelola oleh rakyat, Batu bara juga merupakan sentra perkebunan yang dikelola oleh swasta dan BUMN (PNP/PTP). Komoditas yang diusahakan antara lain karet dan kelapa sawit.

c) Kehutanan

Menurut fungsinya hutan dibagi menjadi hutan suaka marga satwa, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan konversi dan hutan wisata. Total area hutan di Batu Bara mencapai 19.653,86 ha yang dirinci atas 82,58% hutan produksi terbatas dan 17,42% hutan lindung.

Area hutan terluas terdapat di Kecamatan Tanjung Tiram seluas 9.375,53 ha disusul Medang Deras dan urutan ketiga Lima Puluh dengan luas masing-masing 4.731,48 ha dan 2.985,95 ha.

4) Peternakan

Produksi daging unggas tahun 2010 yang terbesar adalah ayam kampung yaitu sebesar 2.225,00 ton, untuk ternak kecil yang terbesar adalah kambing/domba yaitu 13.460 ton dan untuk ternak besar adalah sapi dengan produksi daging sebesar 19.120 ton.

Populasi unggas di Batu Bara dari tahun 2009-2010 semuanya mengalami peningkatan. Untuk ternak kecil yaitu domba dan babi mengalami peningkatan jumlah populasi, hanya populasi kambing yang mengalami penurunan. Ternak besar seperti sapi dan kerbau pada tahun 2010 juga meningkat jumlah populasinya dibandingkan tahun 2009.

5) Perikanan

Produksi ikan laut di Batu Bara pada tahun 2009 sebesar 17.800 ton sedangkan produksi ikan darat sebesar 404 ton. Produksi terbesar dihasilkan oleh Kecamatan Tanjung Tiram yaitu sebesar 10.800 ton disusul Medang Deras dengan produksi sebesar 7.000 ton.

Jumlah nelayan di Batu Bara tahun 2009 adalah 15.538 orang yang terdiri dari 10.989 orang nelayan penuh, 3.128 orang nelayan sambilan utama dan 1.421 orang nelayan sambilan tambahan. Jumlah rumah tangga budidaya perikanan darat sebanyak 709 rumah tangga, terdiri dari 553 rumah tangga petambak dan 156 rumah tangga budidaya kolam.

6. Perindustrian, Pertambangan dan Energi

1) Perindustrian

Di Indonesia industri pengolahan dibagi menurut jumlah tenaga kerjanya yaitu berskala besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Data industri besar dan sedang dikumpulkan oleh PBS sedangkan data industri kecil dan rumah tangga diperoleh dari dinas Kopperindag dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara.

2) Energi

Kebutuhan listrik penduduk kabupaten Batu Bara sebagian besar dipasok oleh PLN Ranting Tanjung Tiram. Pada tahun 2010 pada PLN Ranting Tanjung Titam

terdapat 49.160 pelanggan. Karena sulit untuk memisahkan data, pada cabang Tanjung Tiram mencakup seagian data daerah Kabupaten Simalungun.

Pada tahun 2010, PDAM Kisaran telah menyalurkan air bersih khusus ke wilayah Kabupaten Batu Bara sebanyak 655.038 meter kubik dengan nilai penjualan sekitar 1,43 miliar rupiah. Jumlah pelanggan air bersih sebanyak 5.598 pelanggan dan sebagian besar pelanggan berasal dari rumah tangga yaitu sebanyak 5.462.

7. Perdagangan

Menurut tanda daftar perusahaan yang diterbitkan oleh Dinas Perindag dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara, sampai dengan tahun 2009 terdapat 358 perusahaan yang sebagian besar 68% berbadan hukum PO dan yang bergerak disektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel dan penginapan sebesar 149 perusahaan.

Pada tahun 2010, transaksi perdagangan luar negeri yang tercatat di Pelabuhan Kuala Tanjung mengalami peningkatan untuk jumlah dan nilainya bila dibandingkan tahun 2009. Jumlah ekspor pada tahun 2010 mencapai 1.620.553 ton dengan nilai FOB mencapai 1.799,3 juta US\$ pada saat yang sama jumlah impor mencapai 228.412 ton dengan nilai CIF sebesar 589,83 juta US\$.

Depot Pertamina Kisaran telah menyalurkan sekitar 53,01 juta liter premium dan 36,67 juta liter solar kepada seluruh para palanggannya yang terdiri dari SPBU, TNI/Polri dan konsumen lainnya pada tahun 2009.

Pasar atau pecan di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2009 berjumlah 19 buah, luas totalnya mencapai 60.000 m² dengan jumlah pedagang sebanyak 1.512 pedagang.⁴⁰

⁴⁰ *Batu Bara Dalam Angka 2011*, BPS Kabupaten Asahan.

8. Pariwisata

Memiliki keindahan dan pesona adalah cirri khas dari daerah yang mayoritas penduduknya adalah suku Melayu. Kabupaten Batu Bara tidak hanya memiliki wisata alam, akan tetapi wisata sejarah dan budaya adalah tujuan wisatawan baik domestik maupun internasional ke kawasan. Destinasi wisata Batu Bara tentu saja menambah sektor pariwisata Kabupaten yang tak jauh dari Selat Malaka ini.

a. Sumur Bor Simpang Dolok

Wisata heritage di Kabupaten Batu Bara ini merupakan peninggalan sejarah dari negara Belanda yang pada masa itu menjajah Indonesia.

b. Kubah Datuk Batu Bara

Kubah datu Batu Bara dikenal sebai sejarah awal mula terbentuknya nama Kabupaten Batu Bara. Berada di Kuala Gunung Lima Puluh Kota.

c. Meriam Simpang Dolok

Wisata sejarah, meriam Simpang Dolok juga sama dengan dua meriam lainnya, meriam Simpang Dolok adalah pemberian dari kesultanan Siak yang ada di Provinsi Riau

d. Kantor Camat Lama

Bangunan ini merupakan sebuah bangunan tua yang masih terawatt hingga kini, dibelakang bangunan terdapat sebuah istana yang dulunya didiami oleh kesultanan Lima Puluh.

e. Pantai Sejarah

Disebut sebagai pantai sejarah karena pantai ini memiliki nilai *history* saat penjajahan Jepang tengah menguasai kawasan Batu Bara kala itu. Pantai dengan suguhan pasir putih ini dahulunya dilalui oleh Jepang ketika mereka pertama kali melakukan ekspansi.

f. Situs Perkuburan Mesjid Lama

Wisata sejarah, kesultanan di Batu Bara dapat disandingkan dengan Kesultanan Melayu di tanah Deli. Situs perkuburan mesjid lama adalah areal pemakaman Sultan Datuk Abdul Jalil dan ayahnya.

g. Pulau Pandang

Wisata bahari objek wisata ang satu ini adalah trade mark dari pariwisata Kabupaten Batu Bara. Kerap dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri menjadi areal bahari yang begitu menggoda menggoda untuk dijelajahi.

h. Mesjid Indrapura

Wisata religi dan sejarah, Mesjid Indrapura dikenal dengan peninggalan kesultanan Indrapura di Kabupaten Batu Bara pada tahun 1920.

i. Meriam Nanas Siam

Wisata sejarah, meriam peninggalan bersejarah ini berada di Desa Nanas Siam kecamatan Medang Deras. Objek wisata ini dipugar oleh pemerintah karena memiliki nilai historis tersendiri.

j. Pulau Salah Namu

Wisata bahari, Pulau Salah Namu adalah satu dari dua pulau yang berada di sekitar kawasan Batu Bara. Memiliki panorama nan indah dan memukau pulau ini merupakan pulau terluar di Indonesia.

k. Pantai Wisata Alam

Wisata bahari, pantai indah nan mempesona ini lebih dikenal dengan nama Pantai Datuk Kota Suangai Pasir, pabtai ini mungkin menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat karna masih jarang yang berkunjung ke tempat ini.

1. Meriam Bogak

Meriam Bogak berada di Tanjung Tiram, sebuah kawasan di Kabupaten Batu Bara yang menjadi pusat transportasi laut Kabupaten Batu Bara. Memiliki legenda yang unik sehingga kerap diadakan ritual. Dan masih tempat-tempat pariwisata lainnya di Kabupaten Batu Bara.

BAB IV

SEJARAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Bahwa PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sebenarnya adalah partai yang secara langsung memiliki tali kesejarahan dengan partai politik masa orde lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia itu lahir dari hasil lima fusi partai politik.

Proses fusi terjadi sebenarnya hanya untuk menjamin kemenangan kekuatan Orde Baru. Pada saat itu penguasa Orde Baru mengaktifkan Sekretarian Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) yang proses pembentukannya didukung oleh militer. Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang kepartaian, keormasan, dan kekaryaan disebutkan agar pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong DPR-GR segera membuat undang-undang untuk mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan.

Gagasan agar supaya fusi untuk pertama kali tahun 1970. Tepatnya 7 Januari tahun 1970. Soeharto memanggil 9 partai politik untuk melakukan konsultasi politik dengan para pimpinan 9 partai politik tersebut. Soeharto melontarkan gagasan pengelompokan partai politik dengan maksud untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang lebih tenteran lebih damai bebas dari konflik agar pembangunan bisa di jalankan. Partai politik dikelompokkan ke dalam dua kelompok, kelompok pertama disebut kelompok materiil spirituil yang menekankan pada aspek materiil dan kedua adalah spirituil materiil yang menekankan pada aspek spiritual. Kelompok materiil spirituil menjadi Partai Demokrasi Indonesia dan kelompok spirituil materiil menjadi partai Persatuan Pembangunan.

Kongres I PDI berlangsung dari tanggal 12-13 April 1976. Pelaksanaan kongres I ini sempat tertunda-tunda akibat adanya konflik internal. Di dalam kongres I ini intervensi pemerintah sangat kuat, pemerintah memplot Sanusi Hardjadinata

agar terpilih. Dan hasilnya Sanusi Hardjadinata terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PDI. Susunan DPP hasil kongres I yang susunan personalianya sudah disempurnakan atas kesepakatan antara Mh Isnaeni dan Sunawar.

Kongres II dilaksanakan pada tahun 1981 di Jakarta, meskipun ada penolakan dari Kelompok Empat. Namun, kongres II PDI tetap berlangsung pada tanggal 13-17 Januari 1981 mengambil tema “Dengan menggalang Persatuan dan Kesatuan dalam Rangka Memantapkan Fusi, meningkatkan peranan dan partisipasi PDI untuk mensukseskan pembangunan”.

Kongres III PDI diselenggarakan sebelum pemilu yaitu pada tanggal 15-18 April 1986 di Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta. Kongres III dapat diselenggarakan karena Sunawar Soekawati meninggal dunia. Di dalam kongres ini semakin menegaskan kuatnya ketergantungan PDI pada pemerintah. Kongres III PDI gagal dan menyerahkan penyusunan pengurus kepada Pemerintah. Pada waktu itu yang berperan adalah Mendagri Soepadjo Rustam, Pangab Jenderal Benny Moerdani dan menteri muda sekretaris Kabinet Moerdiono.⁴¹

Partai Demokrasi Indonesia sejak 1973 sampai kongres III pada 1986 terus-menerus dilanda perselisihan intern di kalangan elit pimpinannya, sehingga perolehan suara pada Pemilu 1977 dan 1982 kian menurun. Akan tetapi, pada pemilu 1987 PDI berhasil membuat tiga pusat perhatian yang cukup membuat kejutan.

1. Setiap kampanye PDI berhasil mengumpulkan massa yang tak kalah banyaknya dengan massa dari kedua DPP. Padahal pada dua pemilu sebelumnya (1977 dan 1982) PDI dianggap sebagai partai gurem. Bahkan menjelang pemilu 1987 PDI kurang diperhitungkan.
2. Mayoritas massa yang menghadiri kampanye PDI adalah generasi muda. Akibatnya, PDI mendapat julukan sebagai partai masa depan atau PDI dianggap sebagai fenomena golongan muda.

⁴¹ asal-usul-motivasi.blogspot.co.id/2014/02/asal-usul-sejarah-partai-demokrasi.html?m=1 06 May 2017 pukul 17.00 WIB

3. Kenaikan perolehan suara PDI yang cukup berarti pada pemilu 1987 dibandingkan dengan pemilu 1982. Meskipun jumlah suara PDI pada pemilu 1987 hanya naik sekitar 2 persen dibandingkan dengan pemilu 1971, tetapi melonjaknya jumlah suara PDI yang cukup drastis di beberapa daerah.

Keberhasilan PDI untuk menarik massa selama kampanye terutama dari golongan muda, dan kesuksesan partai ini untuk meningkatkan jumlah suara pada pemilu 1987, khususnya di daerah yang prestos seperti Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Munculnya kembali figur Presiden pertama RI, Ir. Soekarno dalam kampanye PDI, baik berupa poster maupun turunnya anggota keluarga Bung Karno ke kancah politik, yakni Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra sebagai jurkam. Akibatnya generasi muda yang selama ini dianggap tidak punya idola, seakan-akan kembali menemukan sang idola.
2. Tampilnya generasi baru dalam jajaran kepemimpinan PDI, yang dinilai relative bersih dari fragmentasi yang melanda partai ini selama bertahun-tahun, serta keberhasilan mereka melakukan konsolidasi dalam tempo yang relatif singkat, khususnya dibandingkan dengan proses konsolidasi di tubuh PPP yang berjalan sangat lamban. DPP PDI yang juga baru berhasil meningkatkan citra ke demokratisan partai.
3. Dimunculkannya tema-tema kampanye yang dapat menarik simpati lapisan masyarakat kelas bawah serta generasi muda. Pada setiap kampanye PDI cukup berhasil mengidentikkan diri sebagai partai rakyat miskin meskipun citra ini agak memudar ketika tampilnya peragaan kemewahan pada kampanye putaran yang terakhir di Jakarta. Tema-tema lain yang dapat menarik simpati kaum muda adalah peningkatan peranan politik mahasiswa, masalah keadilan sosial, dan kehidupan bernegara yang lebih demokratis.
4. Perpecahan yang terjadi berlarut-larut di dalam tubuh PPP, terutama gencarnya kampanye pengembosan yang dilancarkan beberapa tokoh NU, serta makin buruknya citra kepemimpinan PPP pada waktu itu. Keberhasilan PDI untuk

merebut simpati dari bekas pendukung PPP terlihat dari naiknya jumlah suara pada PDI di daerah-daerah yang menjadi basis PPP. Dalam hal ini, juga patut dicatat berlangsungnya pendekatan yang cukup intensif yang dilakukan oleh DPP PDI terhadap warga NU.

5. Berkaitan dengan sikap ABRI. Pemilu 1987 mencatat sikap ABRI yang lebih netral, yang dianggap menguntungkan PDI. Akibatnya, timbul kesan bahwa ABRI (dan pemerintah) secara tidak langsung ikut mendorong naiknya pamor PDI.⁴²

Setelah gagal kongres IV PDI yang berlangsung di Medan, muncul nama Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh warga PDI untuk tampil menjadi ketua umum. Megawati Soekarnoputri dianggap mampu menjadi tokoh pemersatu PDI.

Untuk menyelesaikan konflik PDI, beberapa hari setelah KLB, Mendagri bertemu Megawati, DPD-DPD dan juga caretaker untuk menyelenggarakan Munas dalam rangka membentuk formatur dan menyusun kepengurusan DPP PDI. Akhirnya Munas dilaksanakan tanggal 22-23 Desember 1993 di Jakarta dan secara de jure Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai ketua Umum DPP PDI. Dalam Munas dihasilkan kepengurusan DPP PDI periode 1993-1998.

Pada tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI dibawah kepemimpinan Megawati menyelenggarakan kongres V PDI yang berlangsung di Denpasar Bali. Kongres ini berlangsung secara demokratis dan dihadiri oleh para duta besar negara sahabat. Kongres ini disebut dengan Kongres Rakyat. Karena selama kegiatan kongres berlangsung dari mulai acara pembukaan yang diselenggarakan dilapangan Kapten Japa, Denpasar sampai acara penutupan kongres, jalan-jalan selalu ramai dipadati warga masyarakat yang antusias mengikuti jalannya kongres tersebut.

Didalam kongres tersebut, Megawati diberi kewenangan khusus untuk mengambil langkah-langkah organisatoris dalam rangka eksistensi partai, NKRI dan UUD 1945, kewenangan tersebut dimasukkan di dalam AD-ART PDI. Meskipun

⁴² Adriana, *PDI dan Prospek...* Hal. 106-107

pemerintahan sudah berganti, namun yang diakui oleh pemerintah adalah masih tetap PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Oleh karenanya agar dapat mengikuti pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 yang disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istan Senayan Jakarta.

Pemilu tahun 1999 membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Dalam perjalanannya kemudian, Megawati terpilih sebagai wakil Presiden mendampingi Kh Abdurrahman Wahid yang terpilih didalam sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4.⁴³

A. Visi dan Misi PDI Perjuangan

1. Visi PDI Perjuangan

Visi partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan, partai adalah:

- a. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.
- b. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila).
- c. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualism dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila).

⁴³ asal-usul-motivasi.blogspot.co.id/2014/02/asal-usul-sejarah-partai-demokrasi.html?m=1 06 May 2017 pukul 17.00 WIB

- d. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara, dan
- e. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Misi PDI Perjuangan

Misi partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 8, 9, dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu:

- a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan
- b. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 partai mempunyai tujuan khusus:

- a. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial.
- b. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi.
- c. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.

- d. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan
- e. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasasila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945.

Pasal 9 partai mempunyai fungsi:

- a. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- b. Melakukan rekrutmen anggota dan kader partai untuk ditugaskan dalam struktural partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik.
- c. Membentuk kader partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara.
- e. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila, dan
- f. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Dalam pasal 10 partai memiliki tugas:

- a. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara.
- c. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik partai.
- e. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggara negara.
- f. Mempersiapkan kader partai sebagai petugas partai dalam jabatan politik dan jabatan publik.
- g. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa.
- h. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.⁴⁴

⁴⁴ www.pdiperjuangan.id/article/category/child/27/Partai/Visi-dan-Misi 09 Mei 2017, Pukul 06.45 WIB

B. Makna Lambang PDI Perjuangan



Lambang PDI Perjuangan berupa gambar banteng hitam bermoncong putih dengan latar merah di lingkaran bergaris hitam dan putih.

Arti gambar:

1. Banteng dengan tanduk yang kekar melambangkan kekuatan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat.
2. Lingkaran melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus-menerus tanpa terputus.

Arti warna

1. Warna dasar merah melambangkan berani mengambil resiko dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat.
2. Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspadah terhadap ancaman dalam berjuang.
3. Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran.⁴⁵

⁴⁵ Tim Divargo. Yugha E., *Profil Partai Politik..* Hal. 111-112

C. Tujuan Partai PDI Perjuangan

1. Tujuan umum partai

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tujuan khusus partai

Mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila.⁴⁶

D. Platform Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

PDI Perjuangan adalah organisasi politik yang terbuka untuk semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kedudukan sosial, dan gender serta berwatak: kebangsaan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial yang perjuangannya berlandaskan pancasila. PDI Perjuangan telah berketetapan menjadikan dirinya sebagai sebuah partai modern yang mempertahankan jati dirinya sebagai Partai Kerakyatan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip berdaulat dibidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Sebagai partai yang mempunyai roh kedaulatan rakyat, PDI Perjuangan dicirikan oleh adanya pengakuan dan penghargaan terhadap demokrasi kebangsaan

⁴⁶ Daniel Dhakidae. *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi..* Hal. 367

dan keadilan sosial. Demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang diwujudkan melalui kedaulatan anggota partai dan diselenggarakan sepenuhnya melalui Kongres Partai. Kebangsaan menempatkan prinsip kewarganegaraan yang mengakui adanya kesamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa kecuali sebagai dasar satu-satunya dalam pengelolaan partai. Bagi PDI Perjuangan prinsip ini menemukan bentuk kongkretnya lewat sifatnya sebagai partai terbuka yang menempatkan kemajemukan sebagai kekayaan dan rahmat Tuhan. Keadilan sosial mengungkapkan komitmen PDI Perjuangan untuk senantiasa mengerahkan semua aktifitas bagi kepentingan rakyat banyak.

Cita-cita Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur, serta beradab dan berketuhanan tidak hanya menuntut sebuah organisasi politik yang modern dan mempunyai roh kedaulatan rakyat, tetapi juga menuntut komitmen, moralitas dan etika yang tinggi bagi para penyelenggaranya.⁴⁷

E. Hasil Penelitian Strategi Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Di Kabupaten Batu Bara.

Rekrutmen anggota baru yang dilakukan oleh suatu partai politik adalah sebuah tahap awal dalam melahirkan seorang kader partai, karena rekrutmen politik pada dasarnya adalah seleksi atau pengangkatan seseorang atau kelompok yang dilakukan oleh partai politik guna berpartisipasi dalam sistem partai politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab melalui keikutsertaannya sebagai anggota salah satu partai politik. Partai politik juga sebagai suatu organisasi yang sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional.

⁴⁷ Ibid., Hal. 368-369

PDI Perjuangan dalam melakukan perekrutan anggota baru tidak memiliki landasan aturan khusus dan ketentuan khusus. Pernyataan khusus yang baru dimiliki seseorang untuk menjadi anggota partai itu tidak ada. PDI Perjuangan bersifat umum dan tidak mempersulit masyarakat dalam bergabung. Masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya masuk sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat dengan mudah mengikuti persyaratannya. Yaitu yang sudah berumur 17 tahun ke atas seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batu Bara.

Syarat-syarat yang ingin menjadi anggota PDI Perjuangan yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau yang sudah memiliki e-KTP atau yang sudah berumah tangga. Kenapa yang sudah memiliki e-KTP, karena yang sudah memiliki e-KTP kan sudah pasti dia memilih, sudah bisa menggunakan hak suaranya. Karena pengisian formulir untuk menjadi anggota PDI Perjuangan, sekaligus akan dibuatkan e-KTAlisasi yang sifatnya online yang seperti e-KTP dan ini berlaku secara nasional. Dan syarat yang ke dua tidak menjadi anggota partai lain atau tidak menjadi anggota di luar partai PDI Perjuangan.⁴⁸

Bahwa sudah jelas yang di sampaikan oleh bapak wakil sekretaris DPC PDI Perjuangan bahwa masyarakat harus memiliki e-KTP yang mau mencalonkan sebagai anggota PDI Perjuangan karna pendaftarannya dilakukan secara online seperti pembuatan e-KTP dan masyarakat bisa langsung terdaftar menjadi anggota PDI Perjuangan. Bapak Suwarsono menambahkan:

Syarat-syarat menjadi anggota Partai PDI Perjuangan pertama, harus warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Kedua, menyetujui dan mentaati Piagam Perjuangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Wawancara dengan wakil sekretaris DPC PDI Perjuangan, Abdullah Sembiring, 30 April 2017, pkl. 09.20 WIB.

Tangga Partai dan Keputusan Partai. Ketiga, bersedia mentaati dan menegakkan disiplin partai. Keempat, dan bersedia mengikuti kegiatan partai.⁴⁹

Sistem kaderisasi dalam partai politik mesti diefektifkan dalam membentuk kader yang berintegritas profesional, kredibel untuk menawarkan suplai produk politik yang berkualitas kepada pasar pemilih. Sistem kaderisasi jika dibuka tujuan dan substansi utamanya adalah untuk membentuk kader yang memiliki jiwa kepemimpinan. Jika kader berkualitas, sejatinya pejabat publik terpilih, yang telah lolos proses perekrutan akan baik pula. Jika sudah demikian bukan hal mustahil peran partai politik mewujudkan negara yang mampu mendorong kesejahteraan ekonomi rakyat akan nampak pula. Itulah tujuan ideal yang harus dilakukan partai politik sehingga penting untuk dilakukan perekrutan sumber daya manusia agar memiliki jiwa kepemimpinan nantinya.

Sistem rekrutmen anggota PDI Perjuangan dilakukan secara terbuka, dengan mendatangi calon anggota partai di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara.⁵⁰

Strategi rekrutmen yang diterapkan oleh PDI Perjuangan terdiri dari dua jalur, yang pertama adalah yang dilakukan secara terbuka. Masyarakat mana saja dapat mendaftar menjadi anggota PDI Perjuangan. PDI Perjuangan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara. Sedangkan yang kedua, dengan mendatangi calon anggota partai di Kabupaten Batu Bara. PDI Perjuangan pro aktif turun ke masyarakat untuk mencari orang yang mempunyai potensi tinggi di bidang akademis maupun tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh besar di wilayahnya.

Strategi ini lebih membutuhkan kerja keras dari kader untuk mau turun ke lapangan guna untuk menjalankan program partai dalam kaderisasi. Kader yang turun kemasyarakat harus benar-benar bisa masuk ke dalam struktur masyarakat untuk

⁴⁹ Wawancara dengan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan, Drs. Suwarsono, 03 Mei 2017, pkl. 09.11 WIB.

⁵⁰ Wawancara dengan wakil ketua DPC PDI Perjuangan, Drs. Suwarsono, 03 Mei 2017, pkl. 09.11 WIB.

dapat melihat potensi-potensi unggul yang ada dalam masyarakat. Kader-kader ini nanti yang bertugas untuk menarik minat calon maupun tokoh yang mempunyai potensi untuk mau menjadi anggota partai.

PDI Perjuangan bisa dengan mudah menarik simpatik masyarakat untuk bisa mendukung dan bergabung ke partai. Dimulai dari pencarian bibit kader berkualitas di tingkat desa, memberikan penawaran kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh di desa untuk masuk menjadi anggota PDI Perjuangan, setelah penempatan bagi kader potensial di posisi strategis di dalam kepemimpinan desa. Sistem ini terbukti efektif karena dari kemampuan kader unggul nantinya akan dengan mudah menarik anggota lainnya untuk masuk ke dalam partai PDI Perjuangan nantinya. Tokoh-tokoh masyarakat juga direkrut masuk karena mempunyai keunggulan saat proses masuk dan mempengaruhi masyarakat untuk mendukung partai yang akan berjalan lebih mudah.

Dalam rekrutmen anggota PDI Perjuangan tidak ada media khusus yang digunakan, hanya saja dilakukan metode sosialisasi yang dilakukan oleh para kader partai PDI perjuangan. Semua itu bertujuan untuk menarik minat masyarakat di seluruh Kabupaten Batu Bara untuk bergabung dengan PDI perjuangan. Dan bagi masyarakat yang bersedia bergabung dengan PDI Perjuangan dapat bertatap muka langsung dengan para kader partai PDI Perjuangan.

Ada tahapan-tahapan dalam pengkaderan PDI Perjuangan yang di sampaikan oleh bapak Suwarsono sebagai anggota dewan DPRD Batu Bara dari ketua fraksi PDI Perjuangan:

Kader pratama yaitu kader partai tingkat bawah atau pemula. Kedua, kader madya yaitu kader partai tingkat menengah. Ketiga, kader utama yaitu kader partai tingkat atas atau senior.⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan, Drs. Suwarsono, 03 Mei 2017, pk1 09.11 WIB

Untuk mengukur militansi seseorang sebagai anggota partai, perlu diadakan pengkaderan, melalui penataran atau pelatihan nara sumbernya dosen dari berbagai disiplin ilmu dan penasehat partai. Pertama, kader pratama dikader selama empat hari, kedua, kader madya dikader selama tujuh hari, ketiga kader utama dikader selama dua minggu.

Tiga tahapan yang diterapkan oleh PDI Perjuangan ini terdapat perbedaan dari segi cara dan tujuan dari pendidikan dan pelatihan kader yang dilakukan. Pertama tahapan kaderisasi berupa pemberian materi kepada para anggota PDI Perjuangan kaderisasi dalam lingkup kabupaten atau kota yang dilakukan DPC yaitu kaderisasi tingkat pratama, di tingkat provinsi yaitu DPD dilakukan kaderisasi tingkat madya, dan pada tingkat paling atas dilakukan kaderisasi tingkat atas atau senior yang dilakukan oleh DPP pada tingkat nasional.

Partai menerapkan sistem ini dengan menyebar para anggota dan kader ke masyarakat guna melatih mereka untuk dapat peka terhadap kehidupan bermasyarakat. Para kader dan anggota yang dikembalikan ke masyarakat tadi ditugaskan untuk mengabdikan dan mendekati masyarakat guna melihat dinamika, isu-isu keinginan dan harapan dari masyarakat terhadap pemerintah khususnya yang berada pada lingkup kekuasaan PDI Perjuangan.

Pengurus partai PDI Perjuangan di DPC Batu Bara dapat bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita partai, misalnya konsolidasi dilaksanakan dengan cara membentuk kepengurusan partai di tingkat kecamatan dan desa berjalan dengan baik.⁵²

Dalam melakukan rekrutmen anggota baru, PDI Perjuangan tentunya memiliki beberapa kendala di dalamnya. Tidak semua usaha dalam melakukan rekrutmen anggota baru berjalan lancar tanpa ada kesulitan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dari internal hingga eksternal partai. Salah satu faktor kesulitan dalam

⁵² Wawancara dengan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan, Drs. Suwarsono, 03 Mei 2017, pk1 09.11 WIB

melakukan fungsi rekrutmen anggota baru PDI Perjuangan Batu Bara adalah masyarakat yang tidak mengerti atau belum paham apa gunanya berpartai. Dan adanya sistem pemilu di Indonesia yang terbuka jadi sangat sulit untuk menempatkan PDI Perjuangan di kursi DPR. Sedangkan kemudahan merekrutmen anggota baru dalam PDI Perjuangan adalah tidak adanya dipungut biaya atau uang pendaftaran.⁵³

Kemudahannya: tanpa uang pendaftaran, mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) cukup mudah dengan memberikan nomor KTP dan pas photo, sudah dapat memperoleh KTA yang ditandatangani oleh ketua umum PDI Perjuangan, KTA PDI Perjuangan dicetak secara online dari Jakarta.⁵⁴

Sistem rekrutmennya membentuk struktural partai dari mulai PAC, Ranting dan Anak Ranting. Di luar struktural partai PDI Perjuangan membentuk sayap maksudnya departemen-departemen di luar struktural PDI Perjuangan seperti BAMUSI, BEPEK (Badan Ekonomi pemberdayaan masyarakat) lalu membentuk departemen olah raga. Terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten maupun di kecamatan atau desa.⁵⁵

PDI Perjuangan yang memiliki daya tarik yang sangat besar di mata masyarakat membuat proses rekrutmen dapat berjalan sesuai dengan keinginan yang diharapkan partai. Terdapat dua sistem yang di terapkan oleh PDI Perjuangan dalam melakukan rekrutmen anggota baru yakni inisiatif pribadi dan penawaran yang dilakukan partai terhadap orang atau tokoh masyarakat yang mempunyai potensi besar untuk keuntungan partai.

Orang yang datang atas inisiatif dan keinginan sendiri untuk mendaftar menjadi anggota PDI Perjuangan para kader yang mendatangi masyarakat yang ingin mendaftar menjadi anggota baru. Tokoh yang berpengaruh di suatu daerah dengan

⁵³ Wawancara dengan wakil sekretaris DPC PDI Perjuangan, Abdullah Sembiring, 30 April 2017, pkl. 09.20 WIB.

⁵⁴ Wawancara dengan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan, Drs. Suwarsono, 03 Mei 2017, pkl. 09.11 WIB.

⁵⁵ Wawancara dengan Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Abdullah Sembiring, 30 April 2017, pkl. 09.20 WIB.

mudah dapat masuk ke struktural masyarakat, sehingga proses penebaran ideologi, tujuan, dan kebijakan juga dengan mudah masuk ke masyarakat yang berada di bawah pengaruh tokoh masyarakat Batu Bara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan saya, maka dapat ditemukan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bahwa di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mereka tidak memiliki cara khusus dalam merekrut anggota baru. Rekrutmen yang mereka lakukan sistemnya terbuka bagi semua kalangan. Setiap masyarakat yang ingin menjadi anggota PDI Perjuangan, anggota partai dapat mendatangi yang ingin mendaftarkan. Dan PDI Perjuangan Sistem rekrutmennya membentuk struktural partai dari mulai PAC, Ranting dan Anak Ranting. Di luar struktural partai PDI Perjuangan membentuk sayap maksudnya departemen-departemen di luar struktural PDI Perjuangan seperti bamusi, BEPEK (Badan Ekonomi pemberdayaan kemasyarakatan) lalu membentuk departemen olah raga. Terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten maupun di kecamatan atau desa.
2. Para anggota PDI Perjuangan kaderisasi dalam lingkup Kabupaten atau Kota yang dilakukan DPC yaitu kaderisasi tingkat bawah atau pemula, ditingkat provinsi yaitu DPD dilakukan kaderisasi tingkat madya, dan pada tingkat paling atas dilakukan kaderisasi tingkat atas atau senior yang dilakukan oleh DPP pada tingkat nasional.
3. Dalam melakukan rekrutmen anggota baru, PDI Perjuangan tentunya memiliki beberapa kendala di dalamnya. Tidak semua usaha dalam melakukan rekrutmen anggota baru berjalan lancar tanpa ada kesulitan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dari internal hingga eksternal partai. Salah satu faktor kesulitan dalam melakukan fungsi rekrutmen anggota baru PDI Perjuangan Batu Bara adalah masyarakat yang tidak mengerti atau belum paham apa gunanya berpartai. Dan adanya sistem pemilu di Indonesia yang terbuka jadi sangat sulit untuk menempatkan PDI Perjuangan di kursi DPR. Sedangkan kemudahan

merekrutmen anggota baru dalam PDI Perjuangan adalah tidak adanya dipungut biaya atau uang pendaftaran.

B. Saran

- a. Diharapkan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjalankan dengan baik amanah rakyat dan bersikap adil seperti yang tertuang di dalam pancasila dan marhaenisme sebagai idiologi partai PDI Perjuangan sendiri.
- b. Membuat pola rekrutmen yang sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut: membentuk tim rekrutmen, menentukan kelompok saran/konstituen mana yang akan direkrut, menyiapkan sarana dan prasarana untuk merekrut, menentukan pesan utama yang akan dikomunikasikan, menetapkan waktu dan lokasi perekrutan, menentukan standar pola rekrutmen yang khusus untuk anggota biasa, pengurus partai, calon legislative, staf professional dan lain-lain.
- c. Untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), diharapkan dapat menjadi lebih di tingkatkan lagi kinerja partainya, kader-kader partai juga harus bisa mempertahankan PDI Perjuangan, agar tidak kalah saing dengan partai lainnya.
- d. Strategi PDI Perjuangan dapat menjadi masukan dan motivasi kepada partai-partai yang akan mengikuti pemilihan umum. PDI Perjuangan melakukan program-program di lapangan dengan berkelanjutan tidak hanya menjelang pemilihan umum diharapkan kepada partai-partai lainnya juga melakukan program-program yang berjalan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kolip, Elly M. Setiadi, Usman. *Pengantar Sosiologi Politik* Jakarta: Kencana, 2013.
- _____ *Pengantar Sosiologi Politik* Cet. 1, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.
- Poerwantana, P.K. *Partai Politik Di Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Zulkifli, Arif. *PDI Di Mata Golongan Menengah Indonesia* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1996.
- E, Tim Divargo. Yugha. *Profil Partai Politik Peserta Pemilu* Jakarta: Erlangga, 2014.
- Dhakidae, Daniel. *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009* Cetakan 1, Jakarta: Buku Kompas, 2004.
- Pratiknya, A. Watik. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi kita* Jakarta: 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan 4. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Harisson, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik* Jakarta: Kencana 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Surbakti, Ramlam. *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam Teori dan Praktik di Indonesia* Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Althoef, Michael Rush dan Phillip *Pengantar Sosiologi Politik* Jakarta: Rajawali, 1986.

Sukanto, Adriana Elisabeth dkk, *PDI Dan Prospek Pembangunan Politik Jakarta*: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991.

Batu Bara Dalam Angka 2011, BPS Kabupaten Asahan.

Jurnal

Muhammad Agam Ashari, *Analisis Rekrutmen Politik: Studi Pada Rekrutmen Anggota Baru DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Tahun 2012-2013*.

Doni septian, *Rekrutmen Politik Dalam Penetapan Calon Legislatif 2014-2019*, Tanjungpinang: 2014

Helmi Mahadi, *Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDI-P Pada Pilkada, Kabupaten Sleman* Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 2.

asal-usul-motivasi.blogspot.co.id/2014/02/asal-usul-sejarah-partai-demokrasi.html?m=1 06 May 2017 pukul 17.00 WIB

www.pdiperjuangan.id/article/category/child/27/Partai/Visi-dan-Misi 09 Mei 2017, Pukul 06.45 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai_politik 06 May 2017 pukul 20.30 WIB